

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif dapat diartikan sesuatu yang membuahkan hasil, mulai berlaku, yang memiliki pengaruh, akibat dan efek. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan.<sup>1</sup>

Menurut Strees yang dikutip oleh Nuraida dalam jurnalnya mengatakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri serta tanpa member tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Menurut Gibson yang dikutip oleh Nuraida dalam jurnalnya mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. tercapainya tujuan dan sasaran itu ditentukan oleh tingkat usaha yang telah dilakukan<sup>2</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dari usaha-usaha yang dilaksanakan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

---

<sup>1</sup> Monika Yuliani, Skripsi: *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020, Hlm. 11

<sup>2</sup> Nuraida, *Efektvitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*, Jurnal Unsub, Vol. 1, No.2, 2019, Hlm. 152

## 2. Pengukuran Efektifitas

Menurut Richard Steer yang kutip oleh Ni Wayan Budiani mengatakan bahwa efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan maksimum. Efektivitas diukur menggunakan standar yang sesuai dengan acuan Litbang Depdagri pada tabel berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 2.1**

**Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri**

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40-59,99	Tidak Efektif
60-79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

*Sumber: Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang terjadi. Efektivitas diukur dengan melihat keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan, Menurut Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin dalam jurnalnya mengatakan bahwa, untuk mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat

---

<sup>3</sup> Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna :Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT, Vol.2, No. 1, Hlm.52

penggunaan, Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di ukur dengan menggunakan indikator-indikator berikut:<sup>4</sup>

a. Tepat sasaran

Sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ialah keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin yang memiliki komponen pendidikan dan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi.

b. Tepat jumlah

Jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan besaran komponen yang didapat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Tepat waktu

waktu pelaksanaan pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sebanyak empat tahap dalam satu tahun yaitu tahap pertama bulan february, tahap kedua bulan Mei, tahap ketiga bulan Agustus, dan tahap keempat di bulan November.

d. Tapat Penggunaan

Dana yang diterima oleh peserta PKH harus digunakan sesuai dengan komponen yaitu: Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial bagi lansia dan Disabilitas.

---

<sup>4</sup>Rizal Khadafi Dan Dyah Mutiarin, *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunung Kidul*, Journal Of Governance And Public Policy, Vol. 4, No, 2, Juni 2017, Hlm. 334

## **B. Program Keluarga Harapan**

### **1. Teori Human Capital**

Menurut teori Human capital kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi produktivitas, semakin produktif seseorang maka dapat keluar dari kemiskinan. Modal untuk sumber daya manusia yang berkualitas adalah tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan kesehatan yang merupakan indikator dari produktivitas. Namun pendidikan yang menjadi faktor terpenting dalam human capital.<sup>5</sup> Jadi kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah dapat memicu kemiskinan, begitupun sebaliknya. Maka dari itu sejalan dengan tujuan dilaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mengentaskan kemiskinan dengan memfokuskan pada komponen pendidikan dan kesehatan.

### **2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan atau sering disebut PKH, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial ini dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat dalam upaya pengentasan kemiskinan, PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan

---

<sup>5</sup> Basri Bado Dkk, *Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi*, (Makassar: Cacabaca, 2017), Hlm.97

balita dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial. Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.<sup>6</sup>

### **3. Tujuan PKH**

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

---

<sup>6</sup> Kemensos RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020* Op.cit. Hlm.1

- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

#### **4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH**

##### a. Hak KPM PKH

Adapun hak yang didapatkan Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu, mendapatkan bantuan sosial PKH, pendampingan sosial PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dan mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

##### b. Kewajiban KPM PKH

Adapun kewajiban KPM PKH ini terbagi kedalam dua kondisi, sebagai berikut:

###### 1) Kewajiban KPM PKH pada kondisi normal terdiri dari:

- a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas atau layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan.
- b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif

- c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
  - d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.
  - e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure).
  - f) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaa verifikasi komitmen.
- 2) Kewajiban KPM PKH pada kondisi pandemi covid-19 terdiri dari:
- a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas atau layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan.
  - b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan protocol kesehatan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas covid-19.

- c) Komponen kesejahteraan social terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan social sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- d) KPM wajib menerima dan menerapkana materi-materi yang ada dalam modul P2K2 khususnya modul kesehatan dan penerapan protokol kesehatan

## 5. Besaran Bantuan

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan empat tahap dalam setahun. Adapun bantuan yang diterima setiap peserta PKH adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### **Indeks Dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial PKH Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Indeks bantuan (Rp)</b>
1	Kategori ibu hamil/nifas	Rp. 3.000.000,-
2	Kategori anak usia dini 0 s.d 6 tahun	Rp. 3.000.000,-
3	Kategori Pendidikan anak SD/Sederajat	Rp. 900.000,-
4	Kategori Pendidikan SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000,-
5	Kategori Pendidikan SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000,-
6	Kategori penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000,-
7	Kategori lanjut usia	Rp. 2.400.000,-

*Sumber: Kementrian Sosial RI 2021*



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda sesuai kategori yang telah ditentukan. Apabila jumlah bantuan yang diterima melebihi batas maksimum atau dalam satu anggota keluarga lebih dari 4 kategori penerima bantuan, maka bantuan yang diberikan adalah hanya 4 kategori yang menerima bantuan.

## **6. Sasaran penerima PKH**

Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini ialah keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen-komponen sebagai berikut:<sup>7</sup>

### **a. Komponen Kesehatan**

Komponen kesehatan ini terbagi dalam dua kategori yaitu kategori ibu hamil dan anak usia dini. Kategori ibu hamil, maksimal 2 kali kehamilan dan kategori anak usia dini, yaitu anak usia 0 s/d 6 tahun maksimal 2 anak.

### **b. Komponen Pendidikan**

Komponen Pendidikan ini terbagi dalam 3 kategori yaitu kategori anak SD/MI Sederajat, SMP/MTs Sederajat dan SMA/Sederajat yang merupakan anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

### **c. Komponen Kesejahteraan Sosial**

Komponen Kesejahteraan ini terbagi dalam 2 kategori yaitu kategori Lanjut Usia yang maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga, dan

---

<sup>7</sup> <https://Pkh.Kemensos.Go.Id> (Diakses Pada Rabu 3 Maret 2021 Pukul 22:05 WIB)

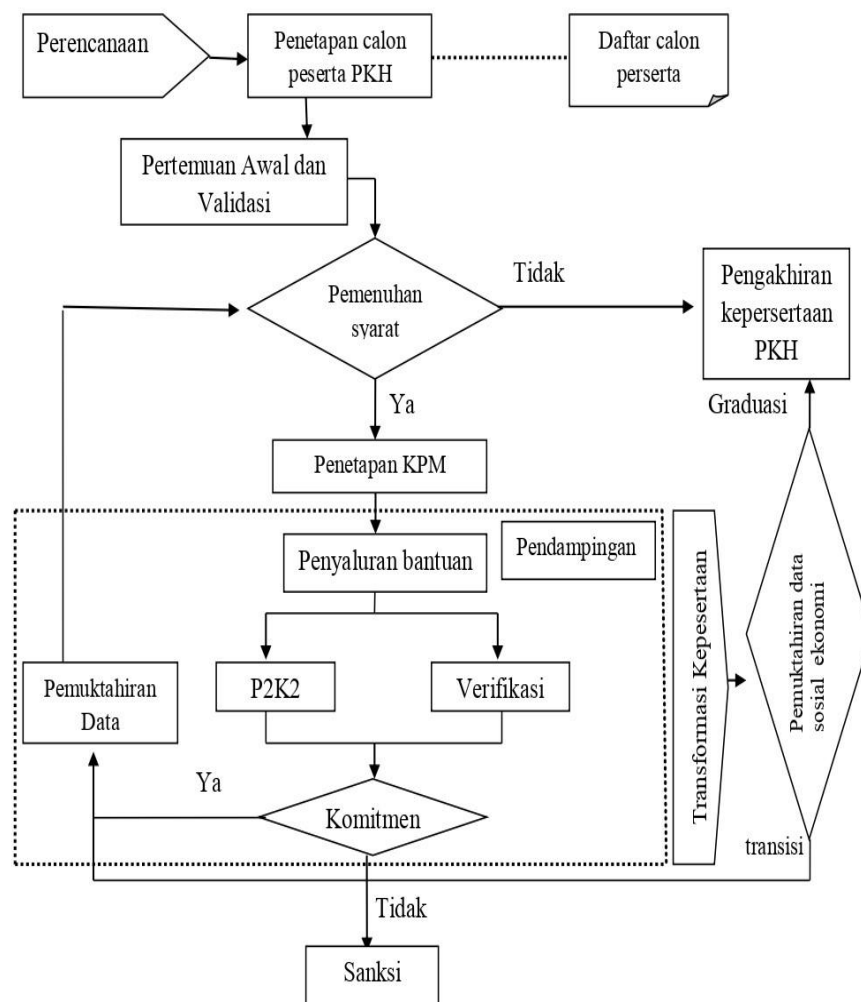
kategori Penyandang Disabilitas berat yaitu penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental yang maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga .

## 7. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat digambarkan dengan skema di bawah ini

**Gambar 2.1**

### Alur PKH



Sumber: Pedoman Pelaksanaa PKH 2021

Dari skema gambar diatas dapat lihat langkah-langakah pelaksanaan PKH dimulai dari perencanaan hingga sanksi bagi yang tidak berkomitmen dalam pelaksanaa PKH dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM PKH.
- b. Penetapan Calon KPM PKH, Setelah ditentukannya lokasi dan jumlah calon KPM PKH ditetapkannya calon KPM PKH oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Republik Indonesia.
- c. Pertemuan awal dan Validasi, pertemuan awal ini dilakukan agar calon KPM PKH mengetahui tentang PKH. Dan validasi dilakukan untuk melihat kelengkapan data pembukaan rekening bank dengan menggunakan aplikasi e-PKH atau formulir validasi.
- d. Penetapan KPM, selanjutnya ditetapkannya KPM jika persyaratan telah terpenuhi. Jika syarat tidak terpenuhi dianggap status KPM orang tersebut berakhir.
- e. Penyaluran bantuan sosial, bantuan diberikan dalam bentuk uang secara bertahap selama satu tahun melalu rekening bank.
- f. Pemuktahiran data, Jika KPM PKH berkomitmen melakukan kewajiban yang telah ditentukan tahap selanjutnya dilakukan pemuktahiran data, pemuktahiran data ini dilakukan untuk melihat kondisi yang terjadi pada anggota KPM PKH. Jika KPM tidak berkomitmen maka akan mendapat Sanksi.

---

<sup>8</sup> Kemensos RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*, Hlm.26-32 (On-Line) Tersedia Di <https://Pkh.Kemensos.Go.Id/>Diakses Pada Sabtu, 13 Maret 2021 Pukul 19:19 WIB

- g. Verifikasi dilakukan untuk melihat komitmen seluruh anggota KPM PKH hadri dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin.
- h. Pendampingan, Ini dilakukan untuk mempercepat tercapainya tujuan PKH salah satunya menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- i. Transformasi Kepesertaan, merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Hasil resertifikasi digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu Graduasi dan Transisi.
- j. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), ini dilakukan sebagai proses belajar untuk mempercepat perubahan pola pikir KPM untuk peningkatan ekonomi yang lebih baik.

## **C. Kemiskinan**

### **1. Teori Kemiskinan**

- a. Teori Marjinal dari Lewis

Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi disebabkan karena adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Menurut Lewis kemiskinan tidak hanya dilihat dari persoalan ekonomi saja, Lewis melihat kemiskinan sabagai cara hidup atau kebudayaan. Konsep Lewis yang terkenal adalah "*Culture Of Poverty*"

Menurut Lewis kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di dunia disebabkan karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter, apatis, kurang usaha atau tidak berusaha, menyerah pada keadaan, pendidikan yang masih lemah, kurangnya tekad dalam diri untuk membangun masa depan yang lebih baik.<sup>9</sup>

b. Teori Lingkaran Setan kemiskinan

Nurkse mengatakan bahwa kemiskinan dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan yg diterima , rendahnya pendapatan akan menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Maka dari itu untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan setiap usaha yang dilakukan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini. Sharp, et.al mengidentifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi, ada tiga penyebab kemiskinan. *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jumlah sumber daya yang dimiliki penduduk miskin terbatas dan kualitasnya pun rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah yang akan berpengaruh pada upah. Sumber daya manusia yang rendah dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, adanya diskriminasi,

---

<sup>9</sup> Rudi Susanto, Indah Pangesti, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta, Journal Of Applied Business and Economic*, Vol. 5 No.4, 2019, Hlm. 342

kehidupan yang kurang beruntung, atau karena faktor keturunan. *Ketiga*, Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan istilah yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai standar minimum yang berlaku atau terjadi di daerah tempat tinggalnya. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers yang dikutip Amir Machmud dalam bukunya mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu (*intergrated concept*) yang memiliki dimensi, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kemiskinan (*proper*)
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*)
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
- d. Ketergantungan (*dependence*)
- e. Keterasingan (*isolation*)

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kemiskinan, menurut Mudrajat Kuncoro yang dikutip Amir Machmud dalam bukunya mengatakan bahwa, Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan

---

<sup>10</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 2006

<sup>11</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Penerbit Erlangga, 2016) Hlm. 280

kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>12</sup>

Menurut Bradley R. Fthiller dikutip oleh Julius R. Latumaerissa dalam bukunya menyatakan bahwa, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial-sosial.<sup>13</sup> Dan Menurut Sar A. Levita dikutip oleh Julius R. Latumaerissa dalam bukunya menyatakan bahwa, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal.<sup>14</sup>

Attacking Poverty mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan, ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak<sup>15</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang individu ataupun kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.281

<sup>13</sup> Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi global*, (Jakarta: Mitra wacana Media, 2015) Hlm.97

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Tnp2k), *Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan, (On-Line)* Tersedia Di [Www.Tnp2k.Go.Id](http://www.Tnp2k.Go.Id) Diakses Pada Senin, 1 Februari 2021 Pukul 22:11 WIB

akan kesehatan sesuai standar dikehidupan yang terjadi di tempat atau di wilayah mereka menetap.

### **3. Jenis-jenis Kemiskinan**

Adapun jenis-jenis kemiskinan menurut Mardimin dikutip oleh Abdul Khaliq dan Betty Uspri dalam jurnalnya menjelaskan bahwa jenis-jenis sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar minimum hidup untuk menjaga fisiknya, dengan membandingkan pendapatan orang tersebut dengan kebutuhan dasarnya.

#### b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif ini dikaitkan dengan kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah. Misalkan seseorang tersebut sudah memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasarnya namun jika dibandingkan dengan daerah lain kondisi orang tersebut jauh tertinggal maka orang yang demikian dianggap sebagai miskin.

#### c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh tatanan kehidupan yang berlaku tidak menguntungkan masyarakat sehingga terjadi kemiskinan.

---

<sup>16</sup> Abdul Khaliid, Betty Uspri, *Kemiskinan Multidimensi Dan Perlindungan Sosial*, (Jurnal Manajemen, Vol.13, No.2), Hlm.109



d. Kemiskinan situasional

Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural dinyatakan dengan situasi yang kurang menguntungkan dan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

e. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural ini terjadi disebabkan karena adat dan budaya yang melekat di masyarakat secara turun temurun sehingga membelenggu sulit terlepas dan menyebabkan seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut miskin.

#### **4. Pengertian kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Kemiskinan merupakan permasalahan hidup yang dialami manusia sejak dahulu, pada zaman jahiliah semua ideologi yang ekstrim banyak diminati di lingkungan masyarakat miskin dan semua perbuatan keji dihalalkan demi memenuhi kebutuhan, orang-orang tega membunuh darah daging mereka hanya kerana merasa takut terhina oleh kemiskinan. Mereka berpandangan bahwa kemiskinan membahayakan kehidupan seseorang, orang miskin tidak merasakan ketentraman dalam hidup, mereka menjalani hidup penuh dengan rasa kecemasan, kegelisahan dan duka.<sup>17</sup>

Kemiskinan banyak menimbulkan kerusakan dimuka bumi oleh perbuatan manusia yang menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sosial sering terjadi kriminalitas seperti pencurian, perampokkan,

---

<sup>17</sup> Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau Dari Perpektif Al-Quran Dan Hadis*, (Jurnal Penelitian, Vol.9, No.1, 2015), Hlm.43

pemerasan dan kejahatan lain yang disebabkan karena faktor kemiskinan.<sup>18</sup>

Dalam Islam kemiskinan disebut sebagai ancaman dari setan, sebagaimana firman

Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha kaya”.

Dalam Islam ada dua istilah mengenai miskin, yakni miskin iman dan miskin harta dalam hal ini penulis akan membahas dari segi miskin harta. Miskin harta adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian kemiskinan menurut Syekh An-nabhani dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli dalam jurnalnya mengatakan bahwa kemiskinan di kategorikan seseorang yang mempunyai harta atau uang tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjanya disebut sebagai orang fakir, dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau uang dan juga tidak mempunyai penghasilan.<sup>19</sup>

Dalam fiqih, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian syara', Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan Miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Istan, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*, (Journal Of Islamic Economics, Vol.2, No.1, 2017), Hlm. 82

<sup>19</sup> Sri Budi Cantika Yuli, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*, (Ekonomika-Bisnis Vo.4, No.2, 2013), Hlm.

<sup>20</sup> Akhmad Mujaidin, *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.7, No1, 2008), Hlm. 173

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Nurul Huda dalam bukunya mengatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>21</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang yang tidak sama sekali memiliki harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. dan orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi harta yang dimilikinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara cukup.

### **5. Indikator Kemiskinan**

Mengukur kemiskinan memerlukan indikator sebagai alat ukur bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut termasuk kategori miskin atau tidak. Untuk menetapkan keluarga atau rumah tangga miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Hariki Fitrah dalam jurnalnya mengatakan ada 14 kriteria, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dai 8 m<sup>2</sup> perorang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah,bambu, dan kayu yang berkualitas rendah
- c. Dinding rumah berupa bambu atau kayu yang berkualitas rendah.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
- e. Belum menggunakan sumber penerangan dari listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari mata air yang tidak terlindungi seperti sumur, sungai, atau air hujan.

---

<sup>21</sup> Nurul Huda Dkk, Op., Cit, Hlm.23

<sup>22</sup> Hariki Fitrah, Penetapan *Keluarga Miskin (Gakin) Di Kelurahan Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara*, Lentera Vol. 14, No.10, November 2014, Hlm. 22

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari masih menggunakan kayu, arang, atau minyak tanah.
- h. Mengonsumsi daging, susu, ayam hanya satu minggu sekali.
- i. Hanya sanggup membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan lain sebagainya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan.

## **6. Program Pengentasan Kemiskinan**

Pengentasan adalah mengikat keatas, jadi pengentasan dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa kearah yang lebih baik atau membawa perubahan positif.<sup>23</sup> Kemiskinan merupakan ketidakanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai hidup yang lebih layak sesuai standar minimal. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu upaya membantu seseorang atau masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.<sup>24</sup>

Permasalahan kemiskinan yang menjadi satu kesatuan yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat dari perdesaan hingga pusat perkotaan yang membutuhkan peran semua pihak secara bersamaan dan terkoordinasi untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dalam mengatasi

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,2008), hlm.401

<sup>24</sup> Risno, Skripsi: *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017, Hlm. 14

permasalahan ini pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang dibagi kedalam tiga kluster program penanggulangan kemiskinan.

Pada kluster pertama, diberikan bantuan dan perlindungan sosial pada keluarga kurang mampu, atau yang disebut kelompok sasaran, melalui penyediaan beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Juga termasuk dalam kluster ini adalah bantuan bagi lanjut usia dan cacat ganda terlantar, bantuan bencana alam, bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran. Pada kluster kedua, digulirkan program dan anggaran berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri. Pada kluster ketiga, dilakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan kredit usaha rakyat (KUR).<sup>25</sup>

## **7. Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dibutuhkan strategi agar terpecahkannya permasalahan ini, Menurut al-Maududi yang dikutip oleh Nurul Huda dalam bukunya menjelaskan bahwa, untuk mengatasi masalah kemiskinan maka yang akan digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi Islam dengan

---

<sup>25</sup> Mudrajad Kuncoro, Op.,Cit, Hlm. 209

karakteristik, (1) berusaha dan berkerja, (2) Larangan menumpuk harta, (3) Zakat, (4) Hukum Waris, (5) Ghanimah, (6) Hemat. Dari model yang dikemukakan yang masih relevan untuk diterapkan hanya lima point karena konsep ganimah sudah tidak lagi ada.<sup>26</sup>

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, didalam Islam negara memiliki tugas-tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Pertama*, kewajiban negara terhadap fakir dan miskin yang ditegaskan dalam al-Quran salah satunya dalam surah at-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
- b. *Kedua*, Untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam al-Quran surah Thaha ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119)

Artinya:

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan terlanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan di timpa panas matahari di dalamnya”.

---

<sup>26</sup> Nurul Huda dkk, Op.,cit, Hlm 25

<sup>27</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), Hlm. 306-315

Banyak Fukaha muslim menyatakan bahwa Negara Islam bertanggung jawab menyediakan standar kehidupan minimal dalam bentuk kebutuhan dasar kepada orang miskin, sakit, cacat, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.

- c. *Ketiga*, Negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial, untuk mencapai keadilan sosial Negara Islam mengambil dua kebijakan. Yang pertama mencegah dan mengutuk orang yang memperkaya diri sendiri, yang kedua Negara Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan melalui aturan-aturan yang efektif.
- d. *Keempat*, Untuk mencapai keadilan sosial ekonomi Islam menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak orang fakir, miskin, musafir, budak dan lainnya untuk mendapatkan bantuan financial.
- e. *Kelima*, Negara kesejahteraan Islam juga berkewajiban melindungi yang lemah terhadap yang kuat.
- f. *Keenam*, Menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis atau cuma-cuma merupakan kewajiban negara kesejahteraan Islam.
- g. *Ketujuh*, Negara harus memperhatikan kesejahteraan spiritual warga negaranya.

Berdasarkan tugas-tugas Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam mengentaskan kemiskinan maka dalam Islam pemerintah harus menerapkan konsep keadilan sosial, berkewajiban terhadap fakir miskin dengan menyediakan kebutuhan dasar yang termasuk dalam kategori bentuk jaminan sosial.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi.

Felinda wulandari dkk menulis sebuah jurnal yang berjudul "*Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan dikecamatan padalarang kabupaten bandung barat belum efektif dikarenakan waktu pemberian dana PKH yang tidak konsisten terhadap waktu yang telah ditentukan , dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, serta akomodasi yang diterima pendamping tidak sesuai dengan jumlah dana akomodasi yang harus dikeluarkan oleh pendamping PKH, penyediaan infrastruktur dalam pelaksanaan PKH masih kurang, sanksi dalam melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH kurang tegas.<sup>28</sup>

Baiq Reinelda Tri Yunarni dkk menulis sebuah jurnal yang berjudul "*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu)*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga harapan (PKH) di Desa Daha telah berjalan dengan baik dilihat dari proses kegiatan mulai dari

---

<sup>28</sup> Falinda Wulandari Dkk, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Carak Prabu Vol 4 No. 1, 2020



sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program semuanya berjalan dengan baik.<sup>29</sup>

Desi Pratiwi menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum efektif dikarenakan sebagai penerima manfaat sudah tergolong mampu secara ekonomi. Dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan tidak efektif dan efektif melalui variabel pengukuran efektivitas dan indikator efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>30</sup>

Munawwarah Sahib menulis sebuah tesis yang berjudul “*Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan persentase 38,4%.<sup>31</sup>

Aprilia Saraswati menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan*

---

<sup>29</sup> Baiq Reinelda Tri Yunarni Dkk, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu)*, Jurnal Ilmu Administrasi Public Vol. 7 No. 2, 2019

<sup>30</sup> Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)*. Lampung: IAIN Metro, 2020.

<sup>31</sup> Munawwar Sahib, Op.,Cit

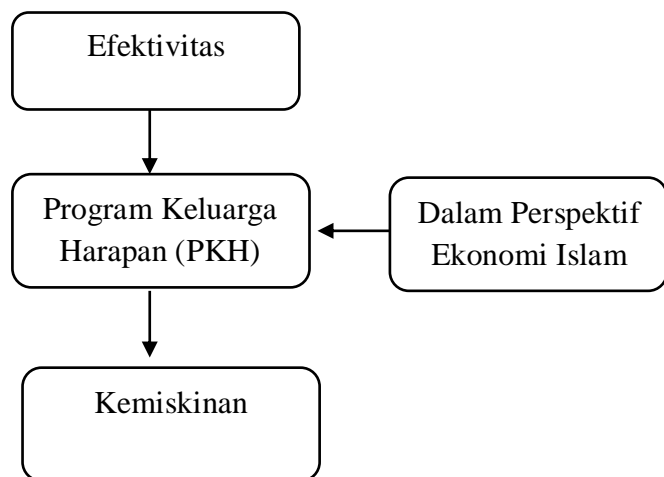
*Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewe)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandansurat.<sup>32</sup>

### **E. Kerangka pemikiran**

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka teori dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Pemikiran**



---

<sup>32</sup> Aprilia Saraswati, Op.,Cit